

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI: STUDI TENTANG KELUARNYA BRITANIA RAYA DARI UNI EROPA PADA TAHUN 2016

Milla Shanthi Rezkyiine¹
Trilke E. Tulung²
Stefanus Sampe³

Abstrak

Kita hidup di dunia yang dimana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dengan sistem atau ideologi yang dianut oleh masing-masing negara serta mempunyai organisasi yang dibentuk untuk memenuhi cita-cita ataupun tujuan dari suatu negara, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Organisasi tingkat nasional dibentuk oleh pemerintahan suatu negara atas permintaan dari warga negaranya, contohnya seperti KNPI di Indonesia. Sedangkan organisasi tingkat internasional dibentuk dengan tujuan untuk menjalin kerjasama yang baik antar negara-negara anggota organisasi tersebut. Contohnya seperti PBB, ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi-organisasi lain. Organisasi Uni Eropa sendiri merupakan organisasi internasional di benua Eropa yang pada awal pembentukannya hanya berdasarkan pada tujuan untuk menghindari perang antar negara di Eropa. Pendirian Uni Eropa ternyata banyak memberikan dampak positif bagi negara-negara anggotanya, yang sekarang tercatat berjumlah 27 negara anggota setelah Britania Raya keluar.

Britania Raya telah resmi keluar dari Uni Eropa sejak tanggal 23 Juni 2016 setelah mengadakan referendum untuk yang kedua kalinya dan menghasilkan total 52% suara yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa serta 48% memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Sebelumnya Britania Raya telah melakukan referendum pada tahun 1975 dengan hasil lebih dari setengah penduduk Britania Raya memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor imigran yang sangat meresahkan Britania Raya pada beberapa tahun terakhir sebelum resmi keluar dari Uni Eropa. Kenapa hal ini terjadi menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan diharapkan dapat dijelaskan pula akibat-akibat yang muncul setelah Britania Raya keluar dari Uni Eropa.

Kata Kunci: Uni Eropa, Britania Raya

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Berita keluarnya Britania Raya keluar dari Uni Eropa atau yang disebut dengan Brexit, Britain Exit yang arti harfiahnya Britania Keluar. Istilah ini merujuk pada referendum rakyat Britania Raya untuk menimbang kembali keanggotaannya di Uni Eropa yang digelar pada 23 Juni 2016 yang menunjukkan bahwa 52% rakyat memilih keluar dari Uni Eropa, sedangkan sisanya 48% memilih tetap menjadi anggota Uni Eropa.

Kabar keluarnya Britania Raya telah diperlihatkan sebelum referendum dimulai. Tetapi dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa telah menyebabkan keretakan di negara-negara Eropa lainnya. Brexit juga menyebabkan tiga jenis perpecahan antara lain Partai di Inggris, negara-negara Eropa, dan penduduk Inggris. Brexit telah menunjukkan rakyat Britania Raya yang telah terbelah pandangannya, antara mereka yang melihat peluang dan mereka yang sangat mencemaskan dampak dari keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa, negara-negara tersebut akan mendapatkan kembali kedaulatan nasionalnya dan banyak lapangan kerja yang tercipta.

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menyebabkan beban-beban keuangan nasional sebesar US\$ 42,4 miliar atau 30 miliar poundsterling. Hal ini disebabkan oleh implikasinya terhadap sektor keuangan, dengan harus dinaikannya pajak penghasilan dan warisan di dalam negeri, serta pemotongan anggaran belanja, khususnya yang harus diberikan untuk jaminan kesehatan nasional melalui National Health Service. Implikasi ekonomi akibat Brexit mengancam pertumbuhan global dan kejatuhan nilai saham. Menguatnya isu Brexit telah

menyebabkan terjadinya guncangan pada pasar uang dan pengaliran arus modal keluar yang deras dari Uni Eropa. Dalam jangka panjang, Brexit dapat menghasilkan resiko kolosal yang tidak jelas akhirnya. Brexit, secara spesifik akan memprovokasi meningkatnya sentimen nasionalisme serta muncul dan menguatnya pemimpin populis dan kanan di Uni Eropa dengan ambisi kekuasaan dan semangat anti imigran yang tinggi, sehingga mengancam instabilitas politik Uni Eropa.

Pada awalnya, tidak semua negara-negara anggota Britania Raya setuju untuk keluar dari Uni Eropa. Negara-negara yang tidak setuju ialah negara Skotlandia dan Irlandia Utara, karena mereka menganggap bahwa keberadaan Britania Raya di dalam Uni Eropa masih menjadi suatu keuntungan dan tidak ada alasan untuk keluar dari Uni Eropa. Tetapi negara Inggris dan Wales menganggap bahwa keberadaan negara mereka di Uni Eropa banyak membawa kerugian, antara lain bebasnya imigran gelap ke negara Britania Raya tanpa ada tindakan tegas dari Uni Eropa. Hal tersebut sangat merugikan negara Britania Raya. Disamping itu, negara Britania Raya diwajibkan membayar 340 pound tiap tahun dengan estimasi manfaat sekitar 3.000 pound.

Keinginan untuk keluar dari Uni Eropa sudah ada sejak tahun 1970-an dan dilaksanakan referendum pertama pada tahun 1975 dimana hasilnya adalah negara Britania Raya tetap berada di Uni Eropa. Seperti yang dilansir dari Says News, keinginan untuk keluar dari Uni Eropa dicetuskan oleh anggota Partai Buruh yang merasa kemampuan finansial setiap negara tidaklah sama. Menurut Partai Buruh negara Britania Raya bukanlah negara

yang kemampuan finansialnya besar seperti Jerman dan Perancis.

Selain masalah iuran berbagai keputusan juga diambil oleh badan tersendiri yakni Komisi Eropa (Ueropen Commission) dan keputusan ini mengikat seluruh anggota Uni Eropa. Untuk kasus penanganan imigran dari Timur Tengah yang berdatangan ke Eropa misalnya, Komisi Eropa memutuskan bahwa Eropa akan membukakan pintu bagi para imigran. Negara dengan keuangan tidak terlalu mapan seperti Yunani tentu mengalami kesulitan dengan kebijakan ini.

Kenyataannya 48% penduduk Britania Raya memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa walaupun akhirnya dikalahkan oleh pihak yang menginginkan Inggris meninggalkan keanggotaan. Perdana Menteri Inggris David Cameron serta 16 anggota parlemen mendukung Britania Raya tetap menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, serta beberapa anggota Uni Eropa lain seperti Perancis dan Jerman juga mendukung Britania Raya untuk tidak meninggalkan Uni Eropa dengan alasan ekonomi yang akan membuat negara anggota lain membayar iuran lebih daripada yang seharusnya.

Akan berbeda halnya jika Britania Raya bukan lagi anggota Uni Eropa dengan setiap transaksi akan dikenakan tarif sama seperti transaksi dengan negara-negara non Uni Eropa. Hal ini dianggap dapat menghambat laju perekonomian Britania Raya. Selain itu, pihak yang pro Uni Eropa berpendapat bahwa imigran yang datang dari Timur Tengah justru dapat menjadi tenaga kerja yang menggerakkan perekonomian dan mereka juga akan menjadi pembayar pajak di negara Britania Raya.

Hasil referendum memang menunjukkan penduduk Britania Raya ingin keluar dari Uni Eropa. Tapi berbagai negosiasi antara kedua pihak harus dijalani untuk menentukan berbagai hal kedepannya. Salah satunya adalah untuk memisahkan perekonomian negara Britania Raya dan Uni Eropa yang saat ini sudah terikat. Proses ini dapat memakan waktu 2 tahun bahkan lebih dan selama masa negosiasi ini, negara Britania Raya dianggap negara anggota Uni Eropa, artinya Britania Raya masih harus mematuhi segala peraturan dan perjanjian keanggotaan, namun tidak berhak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan lagi.

Tinjauan Pustaka

Politik luar negeri sebagai studi dalam ilmu hubungan internasional muncul dari perspektif realis klasik yang dikenalkan oleh Morgenthau pada tahun 1948. Kaum realis berkeyakinan bahwa negara mencerminkan sifat egoisme manusia dan hal ini tercermin dari tindakan suatu negara tersebut kepada negara lain untuk menjaga keamanan dan eksistensi di dalam struktur anarki internasional. Pada mulanya studi politik luar negeri masih bersifat normatif dan hanya berfokus pada sejarah dunia dan hukum. Namun studi politik luar negeri terus berkembang dan berevolusi seiring munculnya perspektif-perspektif baru di dalam studi HI. Studi politik luar negeri memasuki masa behavioralisme pada tahun 1950-1960 yang mulai menggunakan metode perbandingan positif. Kemudian memasuki era konstruktivis dengan menggunakan sudut pandang meta teoritis dalam studi fenomena sosial yang kemudian memperluas spektrum pandangan politik luar negeri. Hal ini menunjukkan

bahwa studi politik internasional selalu mengalami perubahan mengikuti alur perkembangan hubungan internasional baik sebagai fenomena dan bidang keilmuan.

Menurut Hudson, analisis politik luar negeri adalah sub-disiplin hubungan internasional yang mencoba menjelaskan politik luar negeri atau perilaku politik luar negeri berdasarkan landasan teoritis para pembuat keputusan yang bertindak sendirian ataupun berkelompok. Beberapa ciri utama yang menjadi komitmen dari sub-disiplin ini adalah komitmen untuk menganalisis di bawah level negara, yaitu aktor-aktor tertentu. Komitmen untuk membangun teori tentang aktor-aktor khusus (*actor-specific theory*) ini sebagai jembatan antara teori umum tentang aktor (*actor-general theory*) dengan kompleksitas dunia, komitmen untuk mengusahakan penjelasan banyak faktor yang dibagi dalam tingkat-tingkat analisis, komitmen untuk menggunakan teori dan penemuan dari berbagai spektrum ilmu-ilmu sosial dan komitmen untuk melihat proses pembuatan keputusan politik luar negeri sama pentingnya dengan keputusan (*output*) itu sendiri.

Teori umum aktor (*actor-general theory*), seperti diungkapkan Hudson, adalah teori yang menjelaskan perilaku aktor secara umum seperti *game theory*. Teori tentang aktor khusus (*actor-specific theory*) menjelaskan perilaku aktor-aktor khusus seperti dalam teori-teori yang digunakan oleh analisis politik luar negeri. Teori-teori spesifik ini mungkin saja digeneralkan tetapi penerapannya lebih kepada situasi khusus. Jadi ia lebih merupakan *middle-range theory* yang sedikit lebih umum daripada teori atau pemahaman yang dihasilkan dalam kajian-kajian studi kasus, tetapi lebih terbatas

dibandingkan generalisasi dalam teori aktor umum.

Seperti hubungan manusia yang dalam melakukan interaksi mempunyai motif atau kepentingan tertentu. Negara sebagai salah satu aktor Hubungan Internasional dalam interaksinya dengan aktor-aktor lain di sistem global sederhananya juga memiliki kepentingan tertentu. Hal tersebut dalam hubungan internasional disebut dengan kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sering dikritik dalam studi hubungan internasional kontemporer sebagai istilah yang ambigu.

Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat pemikir hubungan internasional dalam mendefinisikan konsep kepentingan nasional. Menurut Oppenheim, konsep kepentingan nasional merujuk kepada tujuan kesejahteraan bagi pemerintahan nasional dalam skala internasional, seperti mempertahankan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah.

Pemikir realis mendefinisikan kepentingan nasional dengan lebih sempit dan sederhana, yaitu kepentingan nasional merupakan pencarian kekuasaan sebagai akibat dari dunia internasional yang anarkis.

Sedangkan menurut David Clinton, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kebaikan bersama yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat negara. Dengan kata lain, kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang berusaha menjelaskan upaya pemenuhan tujuan atau kepentingan suatu negara melalui tindakan-tindakan (keputusan atau kebijakan) yang diambil suatu negara berdaulat dalam interaksinya dengan aktor-aktor hubungan internasional lain dalam sistem global.

Kepentingan nasional berfungsi memfasilitasi proses analisis kebijakan luar negeri dan bahkan menghasilkan penilaian yang lebih realistis yang di buat oleh pengambil keputusan tentang cara dan tujuan dalam memformulasikan kebijakan luar negeri. Sehingga dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, pemerintah dan pemimpin negara mempunyai acuan perhitungan yang jelas tentang risiko, biaya dan keuntungan berdasarkan pada tingkat kepentingan nasionalnya. Selain itu konsep kepentingan nasional juga membantu kita memahami mengapa suatu bangsa-negara memandang dunia berbeda dan akan bereaksi berbeda hal ini karena dalam interaksi pada sistem global kepentingan nasionalnya juga berbeda – beda.

Kepentingan nasional tidak semata – mata muncul tetapi ditentukan oleh pengambil keputusan (decision makers). Menurut Krasner, pengambil keputusan ini adalah pemerintah negara karena dalam pembuatan kebijakan harus menyangkut tujuan nasional yang umum bukan hanya grup kepentingan spesifik atau individu. Pemerintah bertindak sesuai mandat yang diberikan demi kepentingan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak selalu demikian. Kepentingan nasional dapat timbul dari kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem pemerintahan negara–negara yang ada di dunia.

Dimensi kepentingan nasional dasar atau tujuan kepentingan nasional menurut Nuechterlein ada empat, yaitu defence interest, economic interest, world order interest dan ideological interest. Defence interest sederhananya merupakan kepentingan negara untuk melindungi negara dan warganya dari ancaman keamanan secara fisik atau terhadap sistem pemerintahan.

Economic interest adalah peningkatan kebaikan ekonomi dalam interaksi dengan negara lain. World order interest merupakan pemeliharaan politik internasional dan sistem ekonomi dimana negara dapat merasa aman dan beroperasi dengan aman di luar negara. Ideological interest yaitu perlindungan dan pemajuan seperangkat nilai yang secara universal diyakini dan dipandang baik oleh negara.

Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional.” Sekali lagi Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritis ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam jangka panjang. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional”.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode berbasis kepustakaan (Library-based research) dan metode berbasis internet. Metode berbasis kepustakaan (Library research) merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-

buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan tugas akhir ini. Metode berbasis internet, dimanfaatkan untuk mengakses materi ilmiah tradisional (seperti artikel, jurnal ilmiah dan buku), juga dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian kita.

Adapun tempat yang menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian, yakni :

a. Perpustakaan Pusat Universitas Sam Ratulangi Manado

b. E-Library Universitas Sam Ratulangi Manado

Buku, dokumen, artikel, serta jurnal ilmiah yang diambil datanya oleh penulis, yaitu yang ada kaitannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Berikut sebagian buku, dokumen, artikel, atau jurnal ilmiah yang digunakan oleh penulis:

a. Sejarah Uni Eropa: Mendedah Masa Lalu Dan Isu Terkini oleh Petrikor Immanuel

b. Why The UK Voted For Brexit oleh Andrew Glencross

c. The Risk of Brexit oleh Roger Liddle

Teknik analisa data yang akan digunakan penulis adalah Analisis Sekunder (secondary analysis), analisis sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah.

Perang Dunia II telah meluluhlantakkan Eropa. Berbagai gagasan perdamaian pun diserukan untuk mencegah perang kembali terulang. Salah satu orang yang giat menyerukan ialah Winston Churchill. Perdana Menteri Inggris berpendapat bahwa perdamaian Eropa hanya bisa

dicapai apabila negara-negara Eropa bersatu. Dilain sisi, persatuan Eropa itu sekaligus bisa mengeliminasi nasionalisme Eropa yang berlebihan serta lingkungan perang yang terjadi antara satu negara dengan negara lain maupun Eropa secara keseluruhan. Ide Churchill akan persatuan Eropa atau Eropa Bersatu tersebut disampaikan ketika menjadi salah satu pembicara di University of Zurich pada tahun 19 September 1946 yang menyerukan supaya Eropa bangkit dan bersatu.

Pemikiran Winston Churchill akan Eropa Bersatu pun melahirkan sebuah organisasi bernama United Euro Movement pada tanggal 14 Mei 1947 bertempat di London's Albert Hall. Asosiasi ini bertempat di Brussels dan menyatukan individu swasta serta menjadi organisasi penolong untuk bekerja pada pembangunan Eropa yang lebih bersatu. Asosiasi ini mengkampanyekan hak pilih universal untuk memilih parlemen Eropa, mata uang yang unik, dan konstitusi Eropa.

Uni Eropa itu sendiri resmi terbentuk pada tanggal 1 November 1993 di Maastricht, bertepatan dengan mulai diberlakukannya Perjanjian Maastricht, yang dibuat setahun sebelumnya yaitu pada tanggal 7 Februari 1992.

Pada akhirnya, di tahun 2016, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2016, Britania Raya kembali melakukan referendum untuk memutuskan keluar atau tidaknya Britania Raya dari Uni Eropa dan mendapatkan hasil 52% memilih untuk keluar dari Uni Eropa serta 48% memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Terdapat tiga alasan utama mengapa Britania Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Pertama, mereka yang menginginkan Brexit terjadi percaya bahwa jangkauan kekuasaan Uni Eropa begitu besar hingga berdampak pada

kedaulatan Britania Raya. Kedua, kelompok pro-Brexit merasa terganggu dengan aturan yang ditetapkan di Brussels, markas Uni Eropa, di mana mereka meyakini hal itu mencegah bisnis beroperasi secara efisien. Dan yang ketiga serta alasan utama ialah imigran yang memicu perdebatan Brexit dari Uni Eropa semakin memanas. Seperti yang kita ketahui bersama salah satu prinsip utama dari Uni Eropa adalah pergerakan bebas dari setiap warga negara anggota, yang berarti bahwa setiap warga negara Britania Raya dapat bekerja dan hidup di negara mana saja yang tergabung dalam Uni Eropa, begitu pula dengan warga negara anggota lainnya.

Pada tanggal 24 Juni 2016, sehari setelah pelaksanaan Referendum Brexit, Cameron menyatakan akan mengundurkan diri pada bulan Oktober 2016. Pengunduran diri Cameron dikatakan sebagai konsekuensi karena ia gagal membawa pemilih Britania Raya untuk memilih tetap bertahan menjadi negara anggota Uni Eropa dalam referendum tersebut.

Berdasarkan hasil referendum tersebut, dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah penduduk Britania Raya memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Hal ini dikarenakan mereka merasakan banyak kerugian yang dialami dari tahun ke tahun. Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh Britania Raya antara lain di bidang ekonomi, imigran, dan kebijakan-kebijakan yang semuanya diatur oleh Uni Eropa.

Saat kita menjadi anggota dari sebuah organisasi tentunya kita akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Seperti halnya Britania Raya ketika menjadi anggota Uni Eropa dan saat keluar dari Uni Eropa memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, di antara lain masalah imigran, bea cukai,

perdagangan, perpajakan, dan kebijakan negara yang harus mengikuti aturan dari Uni Eropa yang mengharuskan negara-negara anggotanya mematuhi kebijakan-kebijakan yang di buat oleh Uni Eropa. Keuntungan dan kerugian tersebut di rangkum dalam tabel berikut.

No. Keuntungan Kerugian

1. Britania Raya dapat kemudahan ekspor dari bea cukai ke Uni Eropa Imigran dari sesama anggota Uni Eropa bebas keluar masuk ke Britania Raya
2. Pembayaran pajak sebesar 2,5% dari pendapatan pertahun
3. Tidak bisa membuat kebijakan negara sendiri

Seperti yang dapat kita lihat pada tabel diatas, Britania Raya lebih banyak keuntungan saat keluar dari Uni Eropa dibanding ketika masih bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini yang memicu keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.

Ketika isu Brexit beredar, nilai tukar euro dan poundsterling mengalami penurunan drastis. Sedang saat itu warga Britania Raya sedang melakukan voting mengenai tetap tidaknya Britania Raya di Uni Eropa. Isu yang keluar saat itu memberikan sentimen negatif kedua mata uang tersebut.

Poundsterling jatuh 9% ke level US\$ 1,355. Jatuhnya yang lebih dari 15 sen tersebut, merupakan koreksi terdalam yang pernah dialami poundsterling dalam 30 tahun terakhir. Sementara untuk euro, turun drastis 2,8% akibat dari isu Brexit tersebut. Koreksi yang dialami dua mata uang ini bahkan lebih parah dari saat krisis financial global 2007 – 2008 lalu, yang saat itu baik euro dan pound hanya bergerak paling banyak 3 sen saja.

Kemudian setelah Brexit dampak yang sudah terlihat jelas dari Brexit ialah masalah tentang imigrasi yang

mulai berkurang sejak hasil referendum 2016 keluar. Banyak warga negara Jerman dan Swedia yang menetap di negara Inggris mulai kembali ke negara asal setelah keputusan referendum resmi dikeluarkan.

Selain itu, dampak ekonomi juga terlihat sangat jelas. Pada Jumat, 24 Juni 2016, satu hari setelah hasil referendum Brexit, nilai poundsterling turun sangat rendah yaitu US\$ 1,323 per 1 poundsterling, atau kehilangan lebih dari 10% dari nilai awal sejak dibukanya perdagangan harian. Yang kemudian naik kembali ke US\$ 1,365 pada pukul 16.10 waktu setempat.

Selain berdampak pada nilai tukar poundsterling, hasil Brexit juga memukul jatuh nilai tukar euro, yang saat itu mengalami penurunan sebesar 23,3% terhadap US\$, menjadi US\$ 1,103 per 1 euro. Dolar Australia bahkan juga ikut terpengaruh akibat dari turunnya nilai tukar poundsterling, mengalami penurunan 3% lebih rendah untuk 73,82 sen AS.

Sedangkan dampak Brexit untuk Indonesia itu sendiri adalah jika Britania raya tidak terikat lagi secara hukum dengan Uni Eropa, investasi yang dilakukan di Britania Raya akan menjadi berat apabila kita berharap untuk memasukkan investasi ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Britania Raya tidak lagi dapat menjadi batu loncatan untuk masuk ke pasar Eropa.

Nilai tukar rupiah juga melorot. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, perdagangan rupiah ditutup melemah ke level Rp 13.296 per dollar AS dari sehari sebelumnya di posisi 13.265 per dollar AS. Gejolak di pasar modal dan pasar uang tersebut belum jadi indikator kuat bahwa Brexit akan berpengaruh signifikan terhadap

perekonomian Indonesia. Sebab, gejolak tersebut lebih digerakkan oleh faktor sentimen ketimbang faktor fundamental. Seperti diungkapkan Gubernur BI Agus Martowardojo, merupakan kewajaran jika kurs rupiah bergejolak akibat Brexit. Namun, gejolak tersebut bersifat temporer dan akan reda dalam beberapa waktu ke depan.

Jadi, pengaruh Brexit pada dunia sangat terasa di bidang ekonomi, khususnya pada nilai tukar kurs yang terjadi pada beberapa nilai tukar mata uang seperti poundsterling, euro, dollar, dan rupiah juga mengalami penurunan. Penurunan nilai mata uang yang sangat terlihat adalah poundsterling dan euro. Meskipun baik dollar dan rupiah juga mengalami penurunan, namun tidak menurun drastis seperti halnya poundsterling dan euro. Untuk kerjasama Indonesia dan Britania Raya tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi hal ini menjadikan kerjasama Indonesia dan Britania Raya menjadi lebih mudah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa alasan utama Britania Raya keluar dari Uni Eropa dikarenakan banyaknya kerugian yang dirasakan oleh Britania Raya saat menjadi negara anggota Uni Eropa. Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh Britania Raya antara lain menyangkut permasalahan imigran, perdagangan, perpajakan, serta kebijakan negara yang semuanya tidak lepas dari pengaruh Uni Eropa.

Dari permasalahan yang terjadi antara Britania Raya dengan Uni Eropa ini, kita bisa melihat bahwa ternyata kerjasama multilateral itu lebih sulit dibandingkan dengan kerjasama bilateral.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran penulis adalah diadakannya penelitian lebih lanjut lagi tentang Brexit, yang mungkin selain apa yang dipaparkan oleh penulis, ada kemungkinan dampak-dampak lain akan muncul di kemudian hari. Juga dapat menjadikan tulisan ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lain yang mungkin tertarik untuk meneliti perihal Brexit ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar Suryadi. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Carlsnaes, Walter. (2008). "Actors, structures, and foreign policy analysis" dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy, Theories . Actors . Cases*. Oxford; pp. 85-100.
- Clinton, W. David (1986) "The National Interest: Normative Foundations". *The Review of Politics*, Vol. 48, No. 4: pp. 495-519.
- Dugis, Vinsensio. 2015. "Tools for Analyzing: International Relations, Foreign Policy Analysis, and the Levels of Analysis", dalam perkuliahan SOH320: Analisis Kebijakan Luar Negeri pada 17 September 2015. Departemen Hubungan Internasional. FISIP. Universitas Airlangga.
- Glencross, Andrew. (2016). *Why The UK Voted For Brexit*. Macmillan Publishers Ltd. hal.16-17.
- Goldstein, J. dan Keohane, R. (1993). *Ideas and Foreign Policy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hara, Abubakar Ebi. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Penerbit Nuansa.
- Hudson, V.M. (2008). *The History and Evolution of Foreign Policy Analysis*. In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne (Eds.). *Foreign policy: theories, actors, cases* (pp.xxvi, 442 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Immanuel Petrikor, S.S, N. Wahyudi. (2016). *Sejarah Uni Eropa: Mendedah Masa Lalu Dan Isu Terkini*. Azka Pressindo.hal. 37-107.
- Jackson, Robert ; Sorenson, Georg. (2013). *Introduction to International Relations, fifth edition* : Oxford University Press.
- John Barkdull & Paul G. Harris, "Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory", *Global Environmental Politics*, Vol. 2 no. 2, May 20002, pp. 63-90
- Liddle, Roger. (2016). *The Risk of Brexit*. Rowman & Littlefiels International Ltd. hal.79-80.
- Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.
- Nainggolan, Poltak Partogi. "Brexit", *Penyebab dan Implikasi Globalnya*. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016.
- Nincic, Miroslav. (1999). "The National Interest and Its Interpretation". *The review of Politics*, Vol. 61, No. 1; pp. 29-55.
- Nuechterlein, Donald E. (1976). "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making". *British Journal of International Studies* [Online], Vol.2, No. 3; pp.246-266.
- Nuechterlein, Donald E. (1976). "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and

- Decision Making.” *British Journal of International Studies* [Online], Vol.2, No. 3; pp.248. Tersedia dalam: <http://www.jstor.org/stable/20096778>.
- Oppenheim, Felix E. (1987). “National Interest, Rationality, and Morality”. *Political Theory*, Vol. 15, No. 3; pp. 369-389.
- Sharma, U & Sharma, S.K. (2007). *Principle and Theory in Political Science*. New Delhi: Atlantic. pp. 127-131.
- Wicaksana, I.G. Wahyu. 2009. “The Constructivist Approach Towards Foreign Policy Analysis”, *Indonesian Journal of Social Sciences*, 1(1)
- Wohlforth, William C. 2012. “Realism and foreign policy” in, Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy, Theories . Actors . Cases*. Oxford; pp. 35-53.